

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan II tahun 2021 membaik dari triwulan II tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari struktur PDRB (pada tabel 1). Perbaikan ekonomi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang berkontraksi oleh peningkatan net ekspor luar negeri yang semula 11,2 persen pada semester II tahun 2020 menjadi 16,26 persen pada periode yang sama tahun 2021, serta pengeluaran konsumsi pemerintah semula 7,13 persen pada semester II tahun 2020 menjadi 7,29 persen pada periode yang sama tahun 2021, seiring dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbaikan ekonomi pada triwulan kesatu sejalan dengan proses vaksinasi massal yang mulai dilaksanakan di awal tahun serta dorongan dari kinerja ekspor komoditas utama baik dari sisi nilai maupun volume, juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan II (gambar 1). Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh peningkatan net ekspor luar negeri dan akselerasi konsumsi pemerintah di tengah penurunan kelompok pengeluaran lainnya. Perbaikan ekspor luar negeri sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang meningkatkan permintaan dari mitra dagang utama. Sementara, meningkatnya kinerja konsumsi pemerintah disebabkan oleh adanya kenaikan pagu belanja terutama belanja modal untuk infrastruktur. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perbaikan ekonomi didorong oleh meningkatnya kinerja LU utama Sumatera Selatan yaitu LU pertambangan dan penggalian, LU industri pengolahan, serta LU pertanian, kehutanan dan perikanan. Seiring mulai beroperasinya industri di beberapa negara tujuan ekspor seperti Tiongkok, terjadi tren peningkatan harga komoditas global seperti harga karet, batubara, dan pulp dunia mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Selain itu, potensi peningkatan permintaan karet dan batubara global didorong oleh adanya peningkatan aktivitas manufaktur di Tiongkok terutama untuk industri otomotif dan industri baja. Di sisi lain, perluasan kewajiban penggunaan B30 juga turut mendorong peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO). Pada triwulan II 2021, konsumsi rumah tangga menurun seiring dengan penurunan optimisme masyarakat pasca vaksinasi yang sudah mulai dilaksanakan, dikarenakan masa PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar) di Kota Palembang mulai pada bulan April 2021. Walaupun menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri mendorong konsumsi masyarakat lebih lanjut meskipun di tengah pembatasan aktivitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Realisasi pencairan tunjangan hari raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja/buruh sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi faktor lainnya tidak begitu mendorong perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga. Perbaikan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2021 diperkirakan akan berlanjut. Selain karena faktor base year effect yang rendah, peningkatan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan juga disebabkan oleh percepatan realisasi belanja terutama belanja pegawai dan belanja modal infrastruktur. Uraian Sebelum Pergeseran Sesudah Pergeseran Perubahan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sosial a. Program Penunjang Urusan Pemda Kabupaten/Kota 12,205,677,040 11,902,343,240 (303,333,800) b. Program Pemberdayaan Sosial 1,097,269,882 454,495,779 (642,774,103) c. Program Rehabilitasi Sosial 313,578,100 233,797,600 (79,780,500) d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1,335,644,100 1,058,401,600 (277,242,500) e. Program Penanganan Bencana 3,212,825,100 1,702,630,000 (1,510,195,100) Total 18,164,994,222 15,351,668,219 (2,813,326,003) Berdasarkan tabel 1 tersebut, dijelaskan bahwa terjadi pergeseran anggaran pada APBD Kota Palembang Tahun 2021, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar sosial. Hal ini dikarenakan terjadinya defisit anggaran yang membuat pemusatan anggaran pada urusan-urusan tertentu yang dianggap penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan 4.173.128.552.559 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.555.350.777.559 a. Pajak Daerah 1.279.951.000.000 b. Retribusi Daerah 60.773.550.000 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 63.700.000.000 d. Lain-lain PAD yang sah 150.926.227.559
 Pendapatan Transfer 2.173.015.965.000 a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.832.030.041.000 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 340.985.924.000 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 444.761.810.000 a. Pendapatan Hibah 287.585.000.000 b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 157.176.810.000
 Belanja Daerah 4.329.487.605.453 Belanja Operasional 3.157.890.095.267 Belanja Pegawai 1.663.016.910.631 Belanja Barang dan Jasa 1.412.993.294.806 Belanja Subsidi 19.594.437.392 Belanja Hibah 59.305.202.438 Belanja Bantuan Sosial 2.980.250.000 Belanja Modal 1.043.984.219.242 a. Belanja Modal Tanah 81.236.415.125 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.035.159.751 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.356.205.723 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 677.394.144.343 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.962.294.300 Belanja Tidak Terduga 127.613.290.944 Pembiayaan Daerah (Netto) 156.359.052.894 Penerimaan Pembiayaan 156.359.052.894 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.359.052.894 Penerimaan Pinjaman Daerah 116.000.000.000
 Pengeluaran Pembiayaan 0 Penyertaan Modal Daerah 0
 Besarnya jumlah belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah lebih didominasi oleh belanja pegawai dan barang jasa. Jumlah ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang menunjang pelaksanaan penanganan covid-19 di Kota Palembang tahun 2021. Berdasarkan sasaran inflasi 2019-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017, adalah sebesar 3,5%, 3,0% dan 3,0% dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$. Realisasi inflasi Sumatera Selatan di triwulan I, II dan III tahun 2020 dapat dinyatakan terkendali, yakni berada di dalam kisaran target inflasi nasional tahun 2020 yaitu sebesar $3 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi di Kota Palembang telah terjadi mulai akhir semester 1 (satu) hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2021 sebesar 1,57 persen (YoY). Namun demikian kembali terjadi deflasi pada bulan Mei 2021 sebesar 1,41 persen (YoY) hingga akhir triwulan kedua tahun 2021 (Gambar 2). Inflasi kumulatif pada triwulan kedua ini pun terjadi pada bulan Mei 2021 dengan nilai 0,84 persen (ytd), jauh lebih tinggi daripada bulan Februari 2021 dengan nilai mencapai 0,35 persen (ytd). Hal ini dipengaruhi oleh kelonggaran pada beberapa kebijakan PPKM (Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat) secara bertahap, yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat Kota Palembang semakin membaik dan terkendali.

3.1.2. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting, Barang Lainnya dan Jasa Kota Palembang (Gambar 2)

selama periode triwulan II tahun 2021 tercatat mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2021 yaitu sebesar 0,33 persen (mtm), dengan sebagai komoditas penyumbang inflasi pada triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut: Pada triwulan kedua ini, berdasarkan tabel perubahan harga rata-rata per bulan tahun 2021 (gambar 3), komoditas buah naga mengalami perubahan harga rata-rata per bulan tertinggi dengan perubahan 20,62 persen pada bulan April, dan sebesar 0,02 persen andil terhadap inflasi (tabel 3). Sedangkan minyak goreng (gambar 3), mengalami perubahan harga rata-rata terendah, yaitu dengan nilai 0,88 persen pada bulan Juni 2021, serta sebesar 0,01 persen turut andil terhadap inflasi (tabel 3).

Bulan	Inflasi Deflasi Komoditas Andil
April 1	Daging Ayam Ras 0.17 1 Cabai Merah -0.07 2 Jeruk 0.07 2 Bawang Merah -0.03 3 Rokok Kretek Filter 0.05 3 Cabai Rawit -0.02 4 Pepaya 0.02 4 Kol Putih/Kubis -0.02 5 Pisang 0.02 5 Angkutan Udara -0.01
Mei 1	Ayam Hidup 0.02 1 Cabai Merah -0.20 2 Tomat 0.02 2 Daging Ayam Ras -0.03 3 Jeruk 0.02 3 Cabai Rawit -0.02 4 Buah Naga 0.01 4 Bawang Merah -0.02 5 Cumi-Cumi 0.01 5 Telur Ayam Ras -0.01
Juni 1	Emas Perhiasan 0.04 1 Cabai Merah -0.12 2 Telur Ayam Ras 0.04 2 Bawang Merah -0.06 3 Kursus Bahasa Asing 0.02 3 Angkutan Udara -0.05 4 Buah Naga 0.02 4 Beras -0.03 5 Tas Sekolah 0.01 5 Daging Ayam Ras -0.02

Pada tabel

3 ini menggambarkan bahwa komoditas cabai merah memberikan andil deflasi tertinggi pada triwulan kedua ini, khususnya bulan Mei 2021 sebesar -0,20 persen, lebih tinggi dari inflasi yang terjadi pada komoditas daging ayam ras di bulan April 2021 sebesar 0,17 persen. Hal ini dikarenakan antisipasi Pemerintah Kota Palembang melalui Tim Pengendalian Inflasi yang telah mengadakan monitoring pengendalian inflasi dengan cara membuat kegiatan sidak dan operasi pasar serta bazar murah di Kota Palembang selama 1 (satu) minggu di pasar-pasar tradisional dan kantor kelurahan di Kota Palembang. Komoditas barang lain yang turut memberikan andil terhadap inflasi di Kota Palembang pada akhir Triwulan II tahun 2021 yaitu kursus Bahasa Inggris dan tas sekolah, yaitu sebesar 0,02 persen dan 0,01 persen. Hal ini dikarenakan optimisme masyarakat untuk dapat kembali beraktivitas seiring peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

3.1.3. Resiko ke Depan Atas Inflasi Daerah dan Perkembangan Harga Penutupan penerbangan internasional di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dan penerbangan nasional, hanya dilayani dengan rute Jakarta (Soekarno-Hatta) dan Palembang, telah membuat barang-barang yang semula ditujukan untuk ekspor, menjadi terhambat dan hanya dipasarkan hanya di Kota Palembang, sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya deflasi. Sama halnya dengan triwulan kesatu, bahwa resiko ke depan atas inflasi yang semakin menurun atau disebut juga deflasi, menyebabkan bertambahnya pengalihan asset yang dimiliki masyarakat dan pengusaha, yang tentunya dapat mengubah potensi daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dijelaskan permasalahan yang dihadapi Kota Palembang dalam melaksanakan pengendalian inflasi/deflasi pada triwulan II tahun 2021, diantaranya adalah: 1. Pengalihan minat dan perhatian masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian 2. Berkurangnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan bertambahnya pencatatan warga miskin baru 3. Bertambahnya permasalahan pengangguran terbuka

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selama triwulan II Tahun 2021 ini, adapun kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang bersama beberapa Instansi di Kota Palembang, yang diantaranya adalah: 3.3.1. Rapat pembahasan draft Peraturan Walikota tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Government) pada BUMD di Lingkungan Kota Palembang 3.3.2. Rapat pembahasan dalam rangka persetujuan substansi revisi RTRW Kota Palembang 3.3.3. Mengikuti upacara "Indonesia Maju Virtual Expo dan Forum 2021 melalui Video Conference bersama Direktorat Jenderal Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri RI 3.3.4. Program vaksinasi gratis untuk UMKM 3.3.5. Bhakti sosial dalam rangka HUT Bhayangkara ke-75 Tahun 2021 bersama Polda Sumatera Selatan 3.3.6. Peninjauan infrastruktur di Terminal Halte 3.3.7. Koordinasi Analisis dan evaluasi penerapan PPKM berbasis mikro di daerah dan optimalisasi posko penanganan Covid-19 bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI 3.3.8. Koordinasi Raperda tentang penataan, pengendalian dan retribusi Menara telekomunikasi dan fiber optik 3.3.9. Mengikuti Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor dalam rangka pengawasan keamanan pangan olahan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Palembang 3.3.10. Audiensi dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero 3.3.11. Mengikuti konferensi diseminasi pembelajaran dan hasil program Localise SDGs dengan tema "Mendorong Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" bersama Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) 3.3.12. Edukasi daring training of trainer Hari Gizi Nasional tahun 2021 dengan tema Keluarga Sehat dan Kuat melalui

pemenuhan gizi seimbang melalui vidcon bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Palembang dan PKK Kecamatan se-Kota Palembang

3.3.13. Kunjungan ke UMKM (produk herbal) Ibu Jumiah

3.3.14. Audiensi dengan Bank Sumselbabel terkait dukungan layanan BSB untuk operasional Pemerintah Kota Palembang

3.3.15. Talk show bersama Tribun Sumsel

3.3.16. Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

3.3.17. Rapat koordinasi terkait Nota Kesepahaman Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wilayah Sumsel antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pemerintah Kab/Kota

3.3.18. Audiensi dengan PT. Telkomsel terkait konsep smart city yang diaplikasikan di Kota Palembang

3.3.19. Koordinasi dengan Pansus I yang membahas tentang rancangan, peraturan daerah Kota Palembang tentang Izin Usaha Industri

3.3.20. Intensifikasi pengawasan pasar

3.3.21. Koordinasi percepatan dan optimalisasi pelaksanaan Dana ALokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2021, dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021

3.3.22. Grand opening Palembang Desert Project 2021 bersama Asosiasi Pengusa Kuliner (Aspenku) Sumsel dan Palembang Indah Mall

3.3.23. Koordinasi percepatan realisasi APBD Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2021 bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI

3.3.24. Rakor Vidcon percepatan program vaksinasi Covid-19 bersama Polrestabes Palembang

3.3.25. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Palembang dengan Kepolisian Resor Kota Besar Palembang tentang Kerjasama Peningkatan Keselamatan, kelancaran dan Pendidikan berlalu lintas serta cipta kondisi keamanan dan ketertiban umum

3.3.26. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Palembang dengan Universitas Bina Darma dan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia tentang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia

3.3.27. Penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan Universitas Sriwijaya tentang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi

3.3.28. Penandatanganan perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Palembang dengan Universitas Bina Darma tentang penyelenggaraan program magang/praktek kerja merdeka belajar kampus merdeka dan pembentukan desa/kelurahan

3.3.29. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Palembang dengan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang pariwisata

3.3.30. Sosialisasi program rumah subsidi dari Kementerian PUPR RI Direktorat Jenderal Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

3.3.31. Kunjungan Wakil Walikota Palembang terkait pengawasan makanan, minuman dan obat-obatan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Palembang

3.3.32. Audiensi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembahasan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) Kota Palembang

3.3.33. Grand opening Bakso Gepeng 88 Palembang

3.3.34. Mengikuti Webinar Sharing Knowledge pinjaman daerah sebagai strategi peningkatan infrastruktur di daerah bersama Dirjend Perbendaharaan Kanwil Provinsi Sumsel Kementerian Keuangan RI

3.3.35. Peninjauan infrastruktur sungai

3.3.36. Pelatihan penyuluhan keamanan pangan (PKP)

3.3.37. Penyebaran bibit ikan

3.3.38. Koordinasi program hibah Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat

3.3.39. Koordinasi penyaluran gas bumi pada jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil di wilayah Palembang bersama

3.3.40. Koordinasi persiapan verifikasi persiapan verifikasi lahan hybrid

3.3.41. Koordinasi terkait kesiapan Online Single Submission (OSS) bersama Menteri Perekonomian Bidang Perekonomian, Menteri Dalam negeri, Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan Gubernur dan Bupati/Walikoa se-Indonesia

3.3.42. Koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 dengan tema “Kawal Efektivitas Belanja Pulihkan Ekonomi oleh Presiden Republik Indonesia

3.3.43. Koordinasi dan rekonsiliasi data alokasi dan realisasi Inkesda bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

3.3.44. Peresmian bedah rumah Ibu Kholifah bersama Real Estate Indonesia

3.3.45. Monitoring Wakil Walikota

Palembang ke Pasar 3-4 Ulu Palembang 3.3.46. Pembagian Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai salah satu program Kementerian Sosial RI, pembagian bantuan sosial beras di Kota Palembang, untuk keluarga penerima manfaat di 18 Kecamatan Kota Palembang, guna menanggulangi kemiskinan di Kota Palembang 3.3.47. Pembagian paket Idul Fitri 1442 H/2021 M (Program Palembang Peduli) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang 3.3.48. Kegiatan bazar bahan pokok tahun 2021 se-Kecamatan Kota Palembang 3.3.49. Peninjauan posko penyekatan arus mudik lebaran dalam rangka penyebaran virus Covid-19 di Jakabaring 3.3.50. Press Release penyitaan barang bukti hasil temuan sidak pasar Pemerintah Kota Palembang 3.3.51. Pemusnahan barang bukti hasil temuan sidak pasar Pemerintah Kota Palembang 3.3.52. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan bagi distributor dan retail di Kota Palembang 3.3.53. Penyerahan sembako oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang 3.3.54. Focus Group Discussion (FGD) pengembangan produk wisata budaya di tepian Sungai Musi bersama Deputy Bidang Produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif 3.3.55. Pers rilis hasil temuan Satgas Pangan dan Satgas BPOM 3.3.56. Sidak pengawasan pangan bersama 3.3.57. Kunjungan Wakil Walikota Palembang ke kediaman Anak Putus Sekolah 3.3.58. Monitoring dan operasi pasar Yada, Pasar Lembeh Kerjasama dengan Bulog dan Distributor Pangan 3.3.59. Pembagian paket bantuan Cinta Kasih menyambut Idul Fitri 1442 H bersama Yayasan Budha Tzu Chi Palembang 3.3.60. Monitoring operasi pasar 3-4 Ulu Palembang Kerjasama Bulog dan Distributor pangan 3.3.61. Sosialisasi peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi 3.3.62. Monitoring operasi Pasar Kamboja Palembang Kerjasama dengan Bulog dan distributor pangan 3.3.63. Pembukaan Rumah prioritas koperasi simpanan pinjam nusantara dengan PT. Pos Indonesia (KOPNUSPOS) Cabang Palembang 3.3.64. Grand opening Klinik Kecantikan Puspita Palembang 3.3.65. Peninjauan jalan rusak di Kecamatan Kota Palembang 3.3.66. Pembukaan pasar Bedug Ramadhan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Sako Palembang 3.3.67. Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, penganugerahan pemenang penghargaan pembangunan daerah (PPD) Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2021 3.3.68. Kunjungan Wakil Walikota Palembang ke Pasar Bedug Palembang 3.3.69. Sosialisasi kebijakan penataan ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 3.3.70. Diskusi membangun pola konsumsi masyarakat (Penanganan buka puasa) bersama Direktorat Jenderak Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI 3.3.71. Rapat pemantapan sidak dan operasi pasar 3.3.72. Pembagian sembako di Kecamatan Kertapai oleh Wakil Walikota Palembang 3.3.73. Rapat pendirian SPBU di Bukit Kecil 3.3.74. Koordinasi progress pembangunan Pulau Kemaro 3.3.75. Koordinasi revisi perda 14 tahun 2011 tentang penyelenggaraan transportasi 3.3.76. Koordinasi teknis sidak dan operasi pasar gabungan 3.3.77. Bimbingan teknis pelatihan keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan 3.3.78. Koordinasi peningkatan perekonomian di masa pandemic Covid-19, penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka 3.3.79. Program CSR Bank SUMSEL Babel Syariah yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu Satu 3.3.80. Pembukaan pameran usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Surabaya dengan tema Surabaya Virtual Fashion Craft Sulinary 2021 3.3.81. Advokasi lintas sektor 3 kegiatan program nasional (Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB), Desa pangan, aman dan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang 3.3.82. High Level Meeting Koordinasi Sidak dan Operasi Pasar Gabungan Tim Pengendalian Inflasi Kota

Palembang 3.3.83. High Level Meeting TPID membahas kinerja pengendalian inflasi 2020 dan upaya pengendalian inflasi menjelang puasa bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 3.3.84. Pelatihan dan penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran BUMD 3.3.85. Koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan menuju Lumbung Pangan Nasional tahun 2021 3.3.86. Koordinasi persiapan pelaksanaan Sriwijaya Expo 2021 3.3.87. Koordinasi penguatan peran Pemda dalam mendorong stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di daerah utamanya menghadapi perayaan Hari besar Keagamaan bersama Direktorat Jenderal Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri RI 3.3.88. Launching staycation Sumatera Selatan 2021

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

a. Terjadi keterlambatan penyerapan anggaran, dikarenakan adanya pergeseran anggaran sebagai akibat defisit APBD yang menyebabkan pengalihan pada rekening yang dianggap penting b. Bertambahnya jumlah tenaga kerja yang kurang terampil dan berkreaitifitas untuk meningkatkan kegiatan perekonomian c. Banyaknya Focus Group Discussion dan instruksi Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional mengarahkan pada tugas Pemerintah Kota Palembang, melalui TPID Kota Palembang untuk mendorong pembangunan pertanian dalam skala luas, namun demikian belum didukung oleh stabilitas keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palembang adalah sebagai berikut: 1. Perlunya dikoordinasikan permasalahan pendataan warga yang mendapatkan bantuan sosial, berupa PKH dan lainnya 2. Sosialisasi untuk distributor dan retail tetap melaksanakan kegiatan perdagangan dengan protokol kesehatan yang ketat. 3. Pembinaan kreatifitas yang intensif dari pemerintah kota untuk para kelompok tani, pengusaha industri UMKM dan Koperasi, serta nelayan, sehingga dapat memunculkan produk yang terinovasi 4. Kebijakan operasi pasar murah untuk mengendalikan inflasi pada beberapa produk, khususnya menjelang HKBN di triwulan mendatang. 5. Monitoring pendistribusian barang secara intens